

DAFTAR PUSTAKA

- bisapajak. (2021, Juni 8). *Ini Sejarah Pengecualian PPN di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://bisapajak.com/ini-sejarah-pengecualian-ppn-di-indonesia-redaksi-ddtcnews/>
- Ciputra, R. (2018). Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Outsourcing. *Skripsi*.
- Darussalam, D. S. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: DDTC.
- DDTCNews, R. (2020, Maret 20). *Ini Sejarah dan Perkembangan PPN di Indonesia Bagian Terakhir*. Diambil kembali dari <https://news.ddtc.co.id/ini-sejarah-dan-perkembangan-ppn-di-indonesia-bagian-terakhir-19703>
- Direktorat Jenderal Pajak. (1991). *Surat Edaran Direktur Jenderal pajak No. SE-22/PJ 32/1991 tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dan Jasa Tenaga Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2003). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa di bidang Tenaga Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-47/PJ/2012 tentang Pedoman dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktur Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal*

- Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Fitriya. (2022, April 05). Diambil kembali dari klikpajak: https://klikpajak.id/blog/efaktur-31/#Pokok_Perubahan_Fitur_Update_eFaktur_32
- Greaver, M. F. (1999). *Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives*. AMACOM.
- <https://www.pajak.go.id/id/2-apa-latar-belakang-diluncurkannya-e-faktur>. (t.thn.).
- Kementerian Keuangan. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK. 03/2012 tentang Kriteria dan/atau Jasa Tenaga Kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2022, April 1). Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penyesuaian-tarif-ppn-diiringi-fasilitas-insentif-serta-penyesuaian-perpajakan-lainnya-untuk-melindungi-masyarakat-dan-umkm/>
- Kementerian Keuangan. (2022, April 1). Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-barang-dan-jasa-yang-diberikan-fasilitas-bebas-ppn-dan-tidak-dikenakan-ppn/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK/03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/03/2012 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK/03/2022 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK/03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Mohamad, H. I. (2021, September 6). *PPN dan Asal Muasalnya*. Diambil kembali dari Majalahpajak: <https://majalahpajak.net/ppn-dan-asal-muasalnya-bagian-kedua-tamat/>

Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rika, H. (2021, Juni 14). Diambil kembali dari CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210614094907-532-653961/perusahaan-outsourcing-akan-kena-ppn>

Syafiyyah, D. F. (2018). Tinjauan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Outsourcing. *Tugas Akhir*.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.